



Postgraduate Bosowa University Publishing (PBUP)

Indonesian Journal of Business and Management

e-ISSN: 2460-3767 p-ISSN: 2656-6885

<https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/index.php/jbm>



EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BIDANG PRASARANA DAN SARANA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Evaluation of Budget Preparation Program Policies in the Field of Infrastructure and Facilities of the East Luwu Regency Agriculture Service

Rakhsan, R.^{1*}, Miah Said², Kafrawi Yunus²

¹Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu

²Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*Email: rakhsan80@gmail.com

Diterima: 22 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kinerja context dalam kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana di Dinas Pertanian, mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kinerja input dalam kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana di Dinas Pertanian, menganalisis evaluasi kinerja process dalam kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana di Dinas Pertanian dan menganalisis evaluasi kinerja product dalam kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana di Dinas Pertanian. Fakta yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Metode yang digunakan langsung ditinjau langsung di tempat responden berkegiatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan program didasari oleh kebutuhan masyarakat/petani yang berada di Kabupaten Luwu Timur, selain kebijakan program berdasarkan kebutuhan masyarakat kebijakan program sangat ditentukan dengan kekuatan keuangan daerah, mengingat dalam Pemerintah Kabupaten tidak hanya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dengan demikian variabel di teliti sudah terjawab bahwa kebijakan sebuah program ditentukan oleh Kebijakan Kepala daerah dan legislative dengan mempertimbangkan kekuatan keuangan daerah.

Kata Kunci: Kinerja Context, Kinerja Input, Kinerja Proses, Output, Kebijakan Program

ABSTRACT

The aims of this research are: 1) To describe and analyze the Context Performance Evaluation in Program Policies in the field of Infrastructure and Facilities at the Department of Agriculture. 2) To describe and analyze the performance evaluation of inputs in program policies in the field of infrastructure and facilities at the Department of Agriculture. 3) To describe and analyze the evaluation of process performance in program policies in the field of infrastructure and facilities at the Department of Agriculture. 4) To Describe and Analyze Product Performance Evaluation in Program Policies in the field of Infrastructure and Facilities at the Department of Agriculture. The facts used are primary data and secondary data. The sample in this study were 5 people. Data was collected through interviews. The method used was directly reviewed at the respondent's place of activity. The test results show that the program provisions are based on the needs of the community/farmers in East Luwu Regency, in addition to program policies based on community needs, program policies are largely determined by regional financial strength, considering that the Regency Government is not only the Department of Agriculture and Food Security. Thus, the variables examined have been answered that the policy of a program is determined by the Regional Head Policy and the legislature by taking into account the strength of regional finances.

Keywords: Context performance, input performance, process performance, Output, program policy



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan (Mediaty dan Syarifudin, 2010). Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Mediaty dan Syarifudin, 2010). Penyusunan Anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah selalunya dilakukan secara cermat dengan melihat sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disistematis-kan oleh perencanaan sesuai dengan kebutuhan instansi dalam mengembangkan pembangunan daerah. Selain melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya masih ada beberapa alokasi bantuan keuangan yang lainnya, untuk mengembangkan pembangunan daerah.

Beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah yang terjadi secara bersamaan, baik sosial, dan politik di berbagai daerah. Permasalahan tersebut antara lain meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, melemahnya kegiatan produksi dan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, menurunnya pelayanan prasarana dan sarana umum akibat mengecilnya penerimaan pemerintah daerah termasuk PAD, menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menurunnya ketentraman masyarakat terhadap birokrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Mansyur 2004). Berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut diantaranya adalah dengan menganalisa sistem keuangan daerah termasuk didalamnya sistem penganggarnya (budgetary) Menurut Nordiawan (2006: 48).

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses peng-anggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan peren-canaan strategi telah selesai dilaksanakan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Arniati et al. 2010). Dalam pengelolaan Anggaran, program pemerintah dalam pembangunan yang strategis harus selalu berpedoman terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam sektor pengelolaan anggaran, agar setiap pengalokasian anggaran yang akan digunakan sudah tepat pada segi sasaran maupun dari segi administrasian.

Sementara itu, pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur semenjak tahun anggaran 2021 telah menerapkan anggaran dengan pendekatan kinerja. Di dalam proses penyusunan anggarannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur secara operasional mendasarkan pada permendagri 90 thn 2020 dan perubahan kepmen 50 tahun 2021. Proses penyusunan anggaran merupakan suatu

proses krusial, dimana dalam proses tersebut menyangkut proses penentuan jumlah alokasi dana bagi tiap-tiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk satu tahun yang akan datang. Karena proses penyusunan anggaran merupakan proses yang krusial, maka proses tersebut seharusnya selalu dilakukan evaluasi sehingga kedepannya akan semakin baik. Apalagi sampai saat ini masih banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Luwu Timur bahwa anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah.

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah kabupaten yang sangat baru namun sudah memiliki banyak prestasi, baik dari segi Pembangunan maupun dari segi Pertaniannya. Kabupaten Luwu Timur terlahir pada tahun 2003 yang dimana usulan itu sudah di rencanakan oleh masyarakat setempat selama 44 tahun lamanya, hal itu dapat terjadi karena masyarakat beralasan bahwa banyak potensi daerah tersebut dapat dikelola oleh masyarakat setempat.

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas daerah 6.945 km² yang dimana terdiri dari 11 Kecamatan 124 Desa dan 3 Kelurahan. Pada wilayah 11 Kecamatan Kabupaten Luwu Timur semuanya memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Dari hal tersebut kita melihat bahwa struktur tanah pada kabupaten Luwu Timur cukup baik dan strategis untuk lahan pertanian. Kabupaten Luwu Timur memiliki Lahan sawah seluas 26.487 hektar yang terdiri dari 24.843 hektar sawah irigasi, 1.609 hektar sawah tadah hujan dan 35 hektar sawah pasang surut. Tahun 2016, produksi padi sawah di Luwu Timur mencapai 307.265,92 ton dari luas panen sebesar 42.910 hektar. Lahan kering di Kabupaten Luwu Timur diantaranya digunakan untuk rumah/pekarangan, tegal/kebun, ladang/huma, tanah gembala/padang rumput, rawa-rawa yang tidak ditanami, tambak, kolam/tebat, lahan sementara yang tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lainnya. Persentase penggunaan lahan kering di Kabupaten Luwu Timur yang paling banyak adalah untuk hutan Negara, yakni sebesar 36,97 persen.

Tanaman-padi Rata-rata Produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 sebesar 71,61 Ton/Ha dengan luas panen sebesar 42.810 Ha dan produksi 307.265,92 ton. Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah Kecamatan Wotu dengan total produksi sebesar 62,14 ribu ton. Komoditi tanaman pangan yang dihasilkan Kabupaten Luwu Timur adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Dibandingkan dengan tahun lalu produksi komoditi tersebut mengalami kenaikan hampir di setiap komoditi kecuali kacang kedelai dan kacang hijau yang mengalami penurunan produksi.

Berdasarkan tingginya peluang dari sektor pertanian pada Kabupaten Luwu Timur tentunya membuat tantangan tersendiri untuk kepala daerah agar dalam sektor pertanian ini dapat meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat dan daerah. Oleh sebab itu berikut gambaran pagu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Khususnya pada bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pemerataan pembangunan daerah masih sulit juga didapatkan oleh masyarakat ditandai dengan adanya

pembangunan jalan produksi (JAPRO) dan jalan usaha tani (JUT) yang dibangun di daerah tertentu sering didapatkan bahkan setiap tahunnya selalu mendapatkan pembangunan namun ada juga daerah tertentu yang sudah mengusulkan pembangunan, baik menggunakan jalur Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan, Rencana Kerja (RENJA) dan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Anggota Dewan, masih belum juga membuahkan hasil yang diharapkan. Hal itu membuat polemik pada masyarakat, mengacu pada anggaran yang cukup besar yang terdapat pada Dinas Pertanian terkhusus pada Bidang Prasarana dan Sarana akan tetapi belum bisa merealisasikan usulan pembangunan pada daerah tersebut. Usulan tersebut juga tentunya memiliki dasar bahwa lahan pertanian/perkebunan masyarakat di daerah tersebut sangatlah luas dan hasilnya juga sangat melimpah, tentunya pemerataan pembangunan sungguh sangatlah diharapkan agar masyarakat dapat memaksimalkan/memudahkan akses mobilitas dalam pengangkutan hasil pertanian/perkebunan masyarakat. Namun dari dampak tidak adanya pemerataan pembangunan bisa saja masyarakat akan meninggalkan ladang pertanian/perkebunannya, tentunya dengan alasan akses/medan yang dilaluinya sangatlah sulit sehingga membuat mobilitas pengangkutan dari hasil pertanian/perkebunan masyarakat tidak bisa menjangkaunya dan tentunya akan berimbas pada pendapatan masyarakat.

Disamping itu, masih banyak pula masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang mempertanyakan mengenai pengalokasian anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat. Jika Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki governance yang bagus, seharusnya juga menghasilkan outcome yang bagus.

Kabupaten Luwu Timur belum bisa mengelola anggarannya secara maksimal dalam artian masih terdapat anggaran yang diletakan pada Dinas pertanian belum bisa mengangkat perekonomian terkhusus sektor pertanian pada Kabupaten Luwu Timur. Hal itu sangat terlihat begitu jelas pada masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang dimana pada pengelolaan tanaman padi mulai dari penanaman hingga hasil panen masih sangat bergantung pada kabupaten lain. Hal ini bisa dilihat pada kelompok tani (KOPTAN) yang dibentuk oleh masyarakat yang di sahkan oleh Desa masih terikat oleh sistem yang digunakan oleh Daerah lain.

Hasil dari pertanian Kabupaten Luwu Timur belum dapat meningkatkan pendapatan para petani Kabupaten Luwu Timur, yang dimana hasil pertanian (Padi) masih di jual mentah pada Daerah Lain, yang dimana hal itu terjadi karena adanya ikatan yang dilakukan oleh petani terhadap pengepul dari Luar Daerah Luwu Timur yang berisikan jika alsinta Pengepul Daerah yang digunakan maka hasil panen petani di beli oleh Pembeli oleh Daerah Lain dengan harga yang telah ditentukan oleh pembeli dari daerah lain yang digunakan Alsintannya.

Penjualan hasil pertanian yang masih mentah tentunya sangat merugikan sektor pertanian itu sendiri, dimana Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas, dimana hal itu jiam dikelola secara maksimal antara pemerintah dan petani tentunya dapat

meningkatkan perekonomian petani dan dari pemerintah pastinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adanya tuntutan pemerintah daerah yang ikut berpartisipasi dalam proses penganggaran, maka dalam hal ini diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya (Wulandari, 2011). Di samping memberikan informasi kepada atasan, bawahan juga harus ikut serta dalam penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran ini diperlukan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

Proses penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran yang menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk menyiapkan nilai sumber ekonomi yang disediakan bagi setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban guna melaksanakan perannya masing-masing. Dengan adanya anggaran maka manajemen dapat membandingkan dan menganalisa biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan, yang dapat memberikan informasi bagi manajemen untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan. Karena anggaran mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana, pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis evaluasi kinerja context dalam kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana di Dinas Pertanian, mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kinerja input dalam kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana di Dinas Pertanian, menganalisis evaluasi kinerja process dalam kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana di Dinas Pertanian dan menganalisis evaluasi kinerja product dalam kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana di Dinas Pertanian.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalis karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Sehingga metode penelitian ini memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan judul penelitian yang diangkat maka penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Narasumber dan Informan

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah subjek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang menjadi tujuan penelitian, sesuai permasalahan penelitian ini maka informan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
- 2) Perwakilan Anggota DPRD Dapil 1
- 3) Kasubag Perencana/Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
- 4) Camat pada Dapil 1
- 5) Perwakilan Kelompok Tani pada Dapil 1

d. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan teknik pengumpulan data dari tiga sumber yaitu:

- 1) Arsip dan dokumen program/kegiatan
- 2) Interview dengan informasi terpilih yang sudah barang tentu mengetahui permasalahan yang diteliti, dan
- 3) observasi langsung kepada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan dan beberapa kelompok tani di Kabupaten Luwu Timur

e. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas;

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti, berasal dari sumber-sumber tidak tertulis berupa informasi atau data lapangan yang berkenaan dengan masalah penelitian yang umumnya ditemukan melalui wawancara mendalam (depth interview) dengan informasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berkenaan dengan dokumen, peraturan dan perundang-undangan atau data lain yang sifatnya tertulis dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data tersedia yang diperoleh dari lapangan, penulis pertama-tama membuat rangkuman data, memberikan kode-kode tertentu, merumuskan menjadi tema-tema tertentu yang bermakna, mengelompokkan ke dalam kelas-kelas konstruk yang sesuai dan menyajikannya dalam suatu narasi atau bentuk penyajian kualitatif lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut penulis lakukan sedini mungkin, setiap saat setelah ada data yang diperoleh.

Kesimpulan penelitian akan mengalir mulai dari kesimpulan awal yang belum jelas dan relatif longgar, kemudian bergerak menjadi lebih mengakar dengan kokoh setelah melalui proses verifikasi, yang secara berulang-ulang diuji kebenaran dan kekokohan serta kecocokan selama penelitian berlangsung.

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Dalam reduksi data penelitian menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2) Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan menampilkan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut. Dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3) Concluding Drawing/verification (menarik kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti sesama peneliti berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Kabupaten Luwu Timur dalam arah pembangunan bidang pertanian saat ini terus melakukan sebuah terobosan untuk menunjang program dibidang pertanian untuk mencapai hasil pertanian daerah yang maju dan lebih baik. Adanya visi pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 dengan penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih. Visi Luwu Timur yaitu “Luwu Timur Yang Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” yang ditunjang oleh misi Kabupaten Luwu Timur 2021-2024 yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaring luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Berlandaskan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian telah di cantumkan dalam Dokumen RPJMD. Meningkatkan Kabupaten Luwu Timur memiliki Visi maju melalui pembangunan berkelanjutan dengan berdasarkan nilai agama dan budaya seharusnya dapat dijalankan oleh dinas terkait. Maka dari itu, hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran pada Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur akan di jelaskan sebagai berikut.

1) Context dalam Kebijakan Program

Context berkaitan dengan mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program atau yang mengidentifikasi latar belakang munculnya suatu program. Context dalam Mengevaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran pada Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur berkaitan dengan mengidentifikasi tujuan pelaksanaan program dan sasaran pelaksanaan program.

a. Tujuan Program

Upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk mempermudah apa yang menjadi harapan yang tertuang pada Misi dan Visi Kepala Daerah terpilih agar dapat terealisasi, salah satunya adalah program-program pembangunan dan bantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan program prioritas Bupati Luwu Timur. Tujuan yang mendasari pelaksanaan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Kabupaten Luwu Timur karena permasalahan yang di hadapi petani Luwu Timur yakni keterlambatan dalam pengolahan lahan pertaniannya dan sulitnya akses yang dihadapi petani sehingga kami membuat program yang mendukung visi dan misi bupati terpilih yaitu dengan membentuk dan meningkatkan Jalan Produksi (JAPRO), Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi (JIDES). Hal itu didasari dengan keluhan kesah masyarakat atas sulitnya akses yang dilalui masyarakat menuju ladang, yang dimana jika akses sulit untuk dilalui masyarakat mengeluarkan biaya yang cukup tinggi hal itu dilihat dari cepat rusaknya kendaraan masyarakat ketika mengangkut hasil pertanian mereka. Selain fokus pada jalan pertanian, Dinas pertanian juga membuat program pengadaan alsintan, yang terdiri dari prasarana dan sarana pertanian pertanian yang dimana program tersebut lebih

memfokuskan kepada pengolahan lahan pertanian masyarakat yang dimana jika mendapatkan bantuan pengolahan lahan akan menurunkan dan mengifisiekkan waktu proses pengolahan lahan pertanian masyarakat. Program-program bantuan yang tertuang pada bidang prasarana dan sarana pertanian sangatlah tepat dalam mendukung pembangunan pada sektor pertanian untuk mensejahterakan petani, program tersbut diantaranya adalah Pembangunan jalan pertanian dan prasarana dan sarana pertanian kebutuhan pengolahan lahan pertanian masyarakat.

Penyusunan program merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh pejabat teknis dilapangan dimana hal tersebut bersumber dari ajuan permohonan yang dilakukan oleh petani kepada Kabupaten terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Petani. Tentunya dengan lahirnya program-program dari Dinas pertanian akan membatu masyarakat, hal itu juga dijelaskan oleh salah satu anggota Dewan Kabupaten Luwu Timur.

b. Sasaran Kebijakan Program

Bahwa yang berhak menerima bantuan program bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Kabupaten Luwu Timur adalah tentunya semua masyarakat yang berada di kabupaten Luwu Timur, namun tentunya semua belum tentu terakomodir secara bersamaan berdasarkan kemampuan kekuatan anggaran yang berada di kabupaten Luwu Timur. Dan Tetap mengacu pada kekuatan anggaran pada Kabupaten Luwu Timur Pemerintah lebih selektif kembali dalam memberikan bantuan kepada kelompok tani dengan menggunakan sistem melihat kebutuhan urgent/mendesaknya usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sekali lagi semua tergantung dengan kekuatan anggaran Daerah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua narasumber di atas menunjukkan bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam percepatan proses pembangunan pada sektor pertanian, Luwu Timur dalam hal ini sebagai salah satu daerah yang menjalankan Program ini yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang telah berjalan sejak tahun yang di berdasarkan dokumen-dokumen yang dipedomani oleh Kabupaten Luwu Timur dan tentunya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh dinas pertanian yang tertuang pada program dan mengacu kekuatan anggaran yang terletak pada bidang sarana dan prasana.

Upaya yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang di hadapi petani yakni keterlambatan dalam proses Pengolahan Lahan dan sulitnya akses yang dihadapi masyarakat untuk mengangkut hasil produksi pertanian melalui kebijakan dan alokasi program pada bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian agar percepatan proses pengolahan lahan bisa di laksanakan secara serentak.

2) Input dalam Kebijakan Program

Input mengarah kepada keputusan-keputusan strategi dan desain dalam mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya bahan, alat, manusia, dan biaya

untuk melaksanakan suatu program. Input dalam Program Bantuan yang terletak pada bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Timur.

a. Sarana atau Prasarana Kebijakan Program

Sarana atau prasarana merupakan fasilitas yang diberikan dalam menunjang keberhasilan program-program yang tertuang pada dokumen perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang didistribusikan ke kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur. Pemberian Sarana/Prasarana tersebut berupa Jalan Tani, Jalan Produksi Tani, Pupuk Subsidi, dan Alsintan.

Makna dari sebuah program yang akan direncanakan, dengan ke-pemahaman dan kematangan konsep yang dimana telah dilakukan tahapan verifikasi dan investigasi terhadap permohonan yang diajukan oleh kelompok tani. Jika di fokuskan pada pertanyaan banyak yang bisa dilakukan oleh Dinas pertanian dan ketahanan pangan di antaranya adalah, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan produksi

- pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
- pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian
- pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit

Namun tentunya semua usulan tersebut adalah bersifat sementara ter-gantung hasil investigasi yang dilakukan oleh pejabat teknis di lapangan.

Sarana/prasarana dalam Program yang tertuang pada dokumen perencanaan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur berupa pemberian bantuan yang dapat menunjang keberhasilan dari percepatan proses pengolahan lahan agar hasil Pertanian di Kabupaten Luwu Timur bisa meningkat.

Hadirnya kebijakan yang di tetapkan oleh dinas Pertanian merupakan salah satu faktor yang membuat hasil pertanian masyarakat dapat meningkat, hal itu bisa dibuktikan dengan minimnya pengeluaran-pengeluaran yang harusnya di keluarkan oleh petani kini dapat dijadikan sebagai tabungan oleh petani. Pengeluaran-pengeluaran yang di maksud adalah sewa alsintan, lancarnya akses sehingga kendaraan petani tidak mudah rusak, pengaliran air yang sudah stabil sehingga petani tidak perlu menyewa mesin Pompa air untuk memenuhi kebutuhan air di ladang pertaniannya dan sebagainya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusunan anggaran pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah sangat baik dari capaian-capaian yang dihasilkan oleh tahun-tahun sebelumnya, namun tentunya kebijakan tersebut harus selalu konsisten dengan cara tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan usulan-usulan yang dibutuhkan oleh petani, agar menu usulan yang tertuang pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat di pilih oleh petani sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

b. Sumber Daya Manusia Kebijakan Program

Sumber daya manusia merupakan ujung tombak pada setiap pelaksanaan suatu program. Sumber daya manusia dalam kebijakan alokasi program pada Dinas Pertanian Khususnya di Bidang Sarana dan Prasana. Terkait sumber daya manusia yang terlibat dalam proses alokasi program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian pastilah melibatkan unsur Pemerintah, unsur masyarakat unsur swasta. Ketika berbicara soal Pemerintah tentunya tidak lepas dari Bupati Luwu Timur, kepala dinas pertanian beserta jajarannya, camat, kepala desa beserta jajarannya, berbicara unsur masyarakat yakni kelompok tani yang ada di kecamatan Angkona. Selain itu unsur swasta juga terlibat seperti pihak perusahaan yang memberikan bantuan pengolahan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaksanaan alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melibatkan beberapa sumber daya manusia di antaranya yaitu unsur pemerintah seperti Bupati, kepala dinas pertanian dan jajarannya, camat, kepala desa dan jajarannya, tentunya kelompok tani sebagai unsur masyarakat juga mengambil peran dalam terlaksananya alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, selain itu unsur swasta juga berpartisipasi dalam proses pelaksanaan alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam penyediaan unit pembajakan sawah yang akan disalurkan ke kelompok tani yang terdaftar sebagai penerima bantuan pembajakan sawah.

Tentunya yang terlibat dalam penentuan kebijakannya adalah pemerintah daerah di antaranya Adalah Bupati, Kadis, Camat, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kemampuan dan kondisi keuangan Daerah. Selain, Pemerintah tentunya DPRD memiliki peran juga dalam menentukan Alokasi Kebijakan Program yang dimana tugas dari DPRD adalah menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik secara formal dan Non formal dengan masyarakat. Hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di lapangan terkhusus adalah sektor pertanian Luwu Timur harus dapat di tingkatkan, yang dimana dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Luwu Timur berprofesi sebagai petani, Persentasenya mencapai 43 Persen (66 Ribu jiwa) selain itu juga Kabupaten Luwu Timur memiliki lahan yang cukup luas untuk sektor pertanian terkhususnya tanaman padi.

Selain itu, sumber daya manusia yang berperan penting dalam alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur adalah Bupati Luwu Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya, dalam hal ini Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, Kepala Bidang Saran dan Prasarana dapat turut andil dalam menentukan Program-program yang tepat yang dilkakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur. Unsur masyarakat yakni kelompok tani tentunya juga berpartisipasi dalam pelaksanaan alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang menjadi program prioritas Bupati Luwu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sumberdaya yang terlibat dalam alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur ini berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing unsur yang terlibat mulai dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur swasta berjalan sesuai yang di harapkan dan tetap melakukan koordinasi sesama unsur-unsur yang memilki kepentingan.

3) Proses dalam Kebijakan Program

Proses dalam hal ini mengidentifikasi kekurangan-kekurangan pelaksa-naan program dan memperbaiki implementasinya.

a) Pelaksanaan Kebijakan Program Penyusunan Anggaran

Salah satu hal terpenting dalam pertanian adalah menyediakan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program-program yang dimaksud adalah segala jenis permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan kemudian didiskusikan oleh internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan kemudian di bahas di asistensi Rencana Kerja (RENJA) di Bapelitbangda dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Apa yang menjadi program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur yang telah di laksanakan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Malili, yang dimana ada beberapa program yang sangat dirasakan oleh masyarakat salah satunya adalah pembangunan jalan produksi dan jalan usaha tani yang dimana masyarakat sudah dapat tersenyum dikarenakan dengan sebelum adanya program pemerintah tersebut, masayrakat lebih dalam merogoh koceknya yang dimana medan yang sulit untuk di akses, baik roda 4 maupun roda 2. Aksesnya sangat sulit di karenakan sempit dan berlumpur di saat penghujan datang, sehingga masyarakat untuk berinisiatif mencari jalan alternatif walaupun medan yang di tempuh sangatlah jauh dan belum sepenuhnya layak untuk dilalui namun setidaknya dapat di akses oleh masyarakat. Namun setelah program masuk di Kecamatan Malili masyarakat sangat antusias dalam mengelola ladang pertaniannya, di karenakan hasil yang diperoleh dari ladang pertanian memiliki seleisih yang lebih yang dijadikan tabungan oleh masyarakat atau yang memiliki usaha dapat meningkatkan modal usahanya agar lebih besar. Intinya adalah

masayarakat sangat merasa terbantu dengan program-program yang hadir di Kecamatan Malili. Jadi masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan melalui kelompok tani, yang dimana pelaksanaan perencanaan terdapat 3 pintu, diantaranya adalah melalui pelaksanaan Musyawarah rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Kecamatan, Pokok- Pokok Pikiran (POKIR) DPRD dan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Pemerintah Daerah.

Jadi dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dapat meringankan masyarakat khususnya adalah masyarakat yang memiliki profesi petani. Dimana awalnya masyarakat sangat mengeluhkan dengan akses medan yang harus di lalui untuk ke ladangnya kini dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur masyarakat merasa terbantu.

b) Hambatan Atau Kendala dalam Menentukan Kebijakan Program

Pada indikator ini, yang menjadi kendala awal dalam alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur adalah kekuatan anggaran dan pejabat teknis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melakukan kerja sama dengan kementerian pertanian dalam melakukan pengadaan handtraktor, dengan adanya kerjasama ini maka bantuan handtraktor lebih cepat terealisasi sehingga dapat meminimalisir hambatan yang terjadi.

Hambatan yang terjadi selama proses alokasi program penyusunan anggaran bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur adalah adanya perubahan permendagri 13 tahun 2006 ke permendagri 90 revisi 50 tahun 2020 sehingga berpengaruh pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga berpengaruh pada target2 capain, indikator. Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh bidang prasarana dan sarana pertanian untuk mewujudkan program-program usulan yang di terima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan adalah Pagu SKPD yg diberikan terus mengalami penurunan setiap tahun dg tdk memperhatikan KP1 Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa hambatan atau kendala pelaksanaan program alokasi program penyusunan anggaran bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tentu perlu jadi perhatian khusus oleh pelaksana program maupun dari penerima bantuan tersebut karena sedikitnya jumlah pagu anggaran yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sehingga masyarakat yang mengusulkan bantuan untuk lebih sabar dan dapat memaklumi keadaan dan untuk Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan untuk lebih selektif memilih kelompok tani yang akan di bantu dengan melihat seberapa besar permasalahan di lapangan.

4) Produk dalam Kebijakan Program

Produk dalam hal ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat atau hasil yang telah di capai suatu program. Pada indikator ini, manfaat yang diperoleh dengan adanya alokasi program penyusunan anggaran bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tentunya dapat meningkatkan mutu pengelolaan lahan terkait dengan peningkatan produktivitas padi. Dengan adanya program yang terlaksana di kelompok tani tentunya memiliki pengaruh besar, dimana akses yang di gunakan lebih mudah dan jika untuk di akses mengangkut hasil produksi ladang tidak mengalami kesulitan, selain adanya pembentukan jalan bantuan alsintan dapat memudahkan masyarakat (petani) untuk mengelola ladang pertaniannya, anggaran yang sebelumnya di gunakan untuk menyewa/perbaikan kendaraan kini bisa di gunakan untuk kebutuhan lainnya. Tentunya jika pemerintah selalu terlibat dalam proses peningkatan hasil produksi sektor pertanian bisa dipastikan petani akan selalu merasa terbantu dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

Manfaat program-program di Kabupaten Luwu Timur yaitu mampu mempercepat proses pengelolaan lahan sehingga petani di Kabupaten Luwu Timur menanam padi secara serentak dan panen secara serentak. Selain itu manfaat lain yang di rasakan adalah membantu masyarakat menepati jadwal yang telah disepakati melalui tudang sipulung yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pertanian dan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sawah sehingga bisa di pastikan waktu panen yang serentak. Jadi dapat di simpulkan bahwa manfaat dari program-program ini sangat membantu masyarakat dalam alokasi program penyusunan anggaran bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur.

b. Pembahasan

Hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran pada Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur akan di jelaskan sebagai berikut.

1) Context dalam Kebijakan Program

Context berkaitan dengan mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program atau yang mengidentifikasi latar belakang munculnya suatu program. Context dalam Mengevaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran pada Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur berkaitan dengan mengidentifikasi tujuan pelaksanaan program dan sasaran pelaksanaan program. Penyusunan program merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh pejabat teknis dilapangan dimana hal tersebut bersumber dari ajuan permohonan yang dilakukan oleh petani kepada Kabupaten terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Petani. Tentunya dengan lahirnya program-program dari Dinas pertanian akan membantu masyarakat,

hal itu juga dijelaskan oleh salah satu anggota Dewan Kabupaten Luwu Timur.

2) Input dalam Kebijakan Program

Input mengarah kepada keputusan-keputusan strategi dan desain dalam mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya bahan, alat, manusia, dan biaya untuk melaksanakan suatu program. Input dalam Program Bantuan yang terletak pada bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Timur. Kebijakan penyusunan anggaran pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah sangat baik dari capaian-capaian yang dihasilkan oleh tahun-tahun sebelumnya, namun tentunya kebijakan tersebut harus selalu konsisten dengan cara tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan usulan-usulan yang dibutuhkan oleh petani, agar menu usulan yang tertuang pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat di pilih oleh petani sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

3) Proses dalam Kebijakan Program

Proses dalam hal ini mengidentifikasi kekurangan-kekurangan pelaksanaan program dan memperbaiki implementasinya. Intinya adalah masyarakat sangat merasa terbantu dengan program-program yang hadir di Kecamatan Malili. Jadi masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan melalui kelompok tani, yang dimana pelaksanaan perencanaan terdapat 3 pintu, diantaranya adalah melalui pelaksanaan Musyawarah rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Kecamatan, Pokok- Pokok Pikiran (POKIR) DPRD dan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Pemerintah Daerah. Jadi dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dapat meringankan masyarakat khususnya adalah masyarakat yang memiliki profesi petani. Dimana awalnya masyarakat sangat mengeluhkan dengan akses medan yang harus di lalui untuk ke ladangnya kini dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur masyarakat merasa terbantu.

4) Produk dalam Kebijakan Program

Produk dalam hal ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat atau hasil yang telah di capai suatu program. Pada indikator ini, manfaat yang diperoleh dengan adanya alokasi program penyusunan anggaran bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tentunya dapat meningkatkan mutu pengelolaan lahan terkait dengan peningkatan produktivitas padi. Dengan adanya program yang terlaksana di kelompok tani tentunya memiliki pengaruh besar, dimana akses yang di gunakan lebih mudah dan jika untuk di akses mengangkut hasil produksi ladang tidak mengalami kesulitan, selain adanya pembentukan jalan bantuan alsintan dapat memudahkan masyarakat (petani) untuk mengelola ladang pertaniannya, anggaran yang sebelumnya di gunakan untuk menyewa/perbaikan kendaraan kini bisa di gunakan

untuk kebutuhan lainnya. Tentunya jika pemerintah selalu terlibat dalam proses peningkatan hasil produksi sektor pertanian bisa dipastikan petani akan selalu merasa terbantu dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum mengenai Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan jika dilihat dari 4 variabel yang terdiri 8 indikator dalam model Evaluasi CIPP (Context, Input, Proses dan Product) yaitu dari segi tujuan sudah berhasil mempercepat proses pembangunan yang ada pada Luwu Timur, Khususnya pada sektor pertanian yang dimana apa yang menjadi permasalahan pada proses peningkatan produksi sektor pertanian sudah berlahan teratasi dengan adanya program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, di antaranya adalah dari program jalan sampai dengan alsintan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Tentunya proses yang menjadi acuan pelaksanaan program adalah dari aspirasi masyarakat yang dimana dapat digunakan masyarakat untuk mengajukan permohonan bantuan yaitu diantaranya adalah melalui, Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian. Program-program yang diselenggarakan oleh bidang prasarana dan sarana pertanian garis besarnya sudah membuat dampak yang signifikan, hanya saja ada beberapa yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan program yang diusulkan oleh masyarakat di antaranya adalah kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodir semua usulan, keterbatasan Sumber Daya Manusia yang masih sangat kurang dalam melaksanakan semua program yang di usulkan oleh masyarakat dan yang terakhir adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa segala usulan yang di perhadapkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan seleksi dengan tahapan usulan yang prioritas/urgent yang dapat diakomodir. Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis terkait dengan Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang dapat dijadikan pertimbangan proses penentuan kebijakan program pembangunan di Luwu Timur. a) Untuk melaksanakan program-program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian membutuhkan banyak kebijakan, sebaiknya sebelum penyusunan dokumen perencanaan agar di bicarakan terlebih dahulu kepada pimpinan agar tidak ada perubahan dalam pelaksanaan program, b) Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan,

Kasubag program/perencana menjabarkan kepada pimpinan usulan apa-apa saja yang yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar mendapatkan solusi untuk merealisasikan usulan yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, c) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta di karenakan kekuatan Anggaran Kabupaten masih sangat minim untuk mengakomodir semua usulan yang diterima Dinas Pertanian setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adso, Muhammad. 2009. Teknologi pertanian Universitas Muhammadiyah Malang.
- Akmal, Muh. Ikramullah. (2016). Implementasi program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa Baru Dua Semester Di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Alwi. 2018. Kolaborasi dan Kinerja Kebijakan Publik, Tantangan Dan Strategi Dalam Penentuan Dan Implementasi Kebijakan. Makassar: Kedai Buku Jenny.
- Arikunto, Suharsimi & Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2008. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, N. William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. PT. Hanindita Offset. Yogyakarta.
- Dunn, N. William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Rajawali Press. Jakarta.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Public Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.06 TAHUN 2019 TENTANG Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian. Rencana Strategis Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016-2021.
- Kusuma, R. Dewi. (2016). Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moekijat. 1995. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju
- Mesiono. 2017. "Educators Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan". Pusat Studi Pendidikan Rakyat. Medan, Volume 4 no. 2. Juli-Desember tahun 2017. 3-4
- Muryadi, Agustanico. Dwi., 2017. "Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi". Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Vol.3 No.1, Januari 2017. 2-3.
- Nugroho D, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pradnyana, I Nyoman U., Suardi I Dewa P O., Djelantik, A W S.2017. Realisasi Bantuan Alat Mesin

- Pertanian Kepada Subak (Kasus Pelaksanaan Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung dan Kedelai di Subak Penginyahan Desa Puhu Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar). *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 6(4).
- Rares, Debby D. V. Kawengian. Joyce. Jacinta, 2015. "Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara". *E-journal acta diurnal volume IV*. No 5. Tahun. 2015. 9- 10.
- Rohman, A. T. (2016). Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Bandung: Universitas Pasundan.
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Suratman. H 2017. Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: Capiya Publishing.
- Susanto, Herman. 2016. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Susnaini. 2014. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013 di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Skripsi, Universitas Jember.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad Bandung.
- Taufiqurokman. (2014). Kebijakan publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Sebagai Penyelenggara Negara, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Moestopo Beragama
- Tribuwono, Jonathan. 2017. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial
- Usman, Sundari (2013). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Luwu UtaraWidodo, Joko. (2008) Analisis Kebijakan Publik. Jakarta, Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Wirawan. 2012. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Pers.